
Peran *Good Government Governance* Sebagai Mediasi Pengaruh Kapasitas Manajemen Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Adriawan Toasa¹, Dedy Takdir Syaifuddin², Suprapti³

^{1, 3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Kendari, Indonesia

² Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Article History:

Received July 1st, 2018

Accepted July 18th, 2018

Published July 20th, 2018

Abstract: *The purpose of this study is to investigate and study the role of Good governance as a mediating influence on the performance of the management capacity of the Secretariat of the Southeast Sulawesi Provincial Parliament. The population in this study is the whole civil servants Southeast Sulawesi Provincial Parliament Secretariat with a sample of 101 people. The analytical method used is the analysis of Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the management capacity variable positive and significant impact on the Good Governance. On the other hand for a variable capacity management but not significant positive effect on the performance of Parliament Secretariat of Southeast Sulawesi province, Variable Good governance positive and significant effect on the performance of Southeast Sulawesi Provincial Parliament Secretariat. Therefore discovered the role of Good governance as a mediating variable between management capacity on the performance of Southeast Sulawesi Provincial Parliament Secretariat.*

Keyword:

Capacity Management;

Good governance;

Performance Parliament Secretariat.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2018 Sigma: Journal of Economic and Business.
All rights reserved

How to cite (APA Style):

Toasa, A., Syaifuddin, DT., Suprapti. Peran *Good Government Governance* Sebagai Mediasi Pengaruh Kapasitas Manajemen Terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Sigma: Journal of Economic and Business, 1(2).

Corresponding Author:

STIE Enam Enam Kendari, Indonesia

Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia.

Email: ardipaman@yahoo.com; dtakdirsyafuddin@gmail.com; ratih.tomini@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan penyelenggaraan manajemen pemerintahan, terminologi kinerja menjadi bagian dalam tahapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan bergulirnya reformasi manajemen pemerintahan antara lain ditandai dengan terbitnya Inpres No.7/1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), UU paket keuangan negara (UU No.17/2003, UU No.1/2004 dan UU No.15/2004). Kemudian diikuti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menunjukkan usaha pemerintah untuk memperbaiki sistem pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Pengelolaan Pemerintah Daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004: 21) yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerjanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas kinerjanya yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban (Ayodele, 2011).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Mardiasmo (2004: 63) mengatakan bahwa anggaran berfungsi sebagai; (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) dan alat motivasi. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja

yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan *good governance* terhadap masyarakat (Carlos, 2001).

Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari Pemerintah Daerah serta merupakan proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada Pemerintah Daerah menjadi relevan dan penting (Dwiyanto, 2006).

Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, diharapkan terjadi perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (Seyoum dan Manyak, 2009). Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Sementara itu bagi Pemerintah Daerah, ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Di dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan disusunnya RKA-SKPD berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif.

Melalui penetapan sistem penganggaran berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh. Klasifikasi anggaran yang dirinci mulai dari sasaran strategis sampai pada jenis belanja dari masing-masing program/kegiatan memudahkan dilakukan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan kepada Sekretariat DPRD Prov. Sultra.

Mewujudkan *good governance* dalam praktik pemerintahan sehari-hari tentu bukan hal yang mudah. Disamping komitmen yang kuat pemerintah perlu mengambil dan menggunakan strategi yang tepat (Joshua dan Biekpe, 2007). Luasnya cakupan, kompleksitas masalah serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas pemerintah mengharuskan pemerintah mengambil

pilihan yang strategis untuk pengembangan praktik *good governance* (Morita dan Zaelke, 2007)

Pemerintahan yang baik hanya akan tercapai di daerah, kalau pemerintahan pusat membuat rambu-rambu di tingkat pusat yang bisa menekan pemerintahan daerah untuk melakukan perubahan. Contohnya masyarakat bisa berpartisipasi kalau ada aturan atau perda yang mengatur partisipasi. Tapi, perda itu bisa terbentuk kalau pemerintah pusat membuat aturan yang mewajibkan pemerintah daerah membuat perda yang memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi harus ada intervensi pemerintah pusat itu melalui perundangan yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan sejumlah hal dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Parker dan Serrano (2000). Itu akan sangat membantu terciptanya *good governance*.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua

pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh organisasi sektor publik seperti Sekretariat DPRD Prov. Sultra adalah terjadi keterputusan antara perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan dilapangan. Idealnya terdapat kejelasan mata rantai mulai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi yang diterapkan dengan program kegiatan, dan anggaran yang diajukan. Namun seringkali yang terjadi ketika tahap pengajuan usulan program, kegiatan, dan anggaran masing-masing bagian atau sub bagian sudah lupa dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi. Mereka lebih sibuk dengan upaya menaikan anggaran untuk unit kerjanya. Dokumen perencanaan sebagai acuan seperti RPJP, RPJM, atau Renja kadang hanya disimpan dalam lemari. Kondisi seperti ini menyebabkan tidak tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik seperti in-efisiensi, pemborosan, dan ketidakefektivan pembangunan di Pemerintah Daerah.

Studi empirik tentang kapasitas manajemen, tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja Sekretariat DPRD Prov. Sultra belum dilakukan khususnya dalam tataran Indonesia. Beberapa studi empirik yang mengkaji hal tersebut antara lain:

Yung, *et al.* (2011) dalam studinya menemukan bahwa dua penilaian pengetahuan kapasitas manajemen, akuisisi dan diseminasi, serta faktor komunikasi interaksi sosial positif terkait dengan kinerja organisasi. Dan interaksi sosial memiliki pelengkap atau sinergis efek interaksi dengan pengetahuan kapasitas manajemen pada kinerja organisasi. Implikasi praktisnya adalah mengingat kebutuhan untuk penggunaan kapasitas manajemen merupakan bagian untuk meningkatkan hasil organisasi, olehnya itu perlu menyadari bahwa interaksi sosial akan memoderasi hubungan antara kapasitas manajemen dan kinerja organisasi.

Keterbatasannya adalah pengetahuan kapasitas manajemen merupakan bagian kritis kinerja organisasi. Sudut pandang yang diusulkan dalam penelitian ini menyoroti krusial pentingnya peran moderasi interaksi sosial ketika memeriksa efek kapasitas manajemen pada kinerja organisasi.

Dalam hubungannya dengan kinerja, peningkatan kinerja instansi Sekretariat DPRD Prov. Sultra tidak dapat terwujud apabila tidak ada pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendorong upaya instansi untuk meningkatkan kinerja. Kapasitas manajemen berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah (Propper dan Wilson : 2003).

Peningkatan kinerja dapat dinilai dengan pengukuran kinerja. Behn (2003) mengemukakan bahwa setiap orang dapat mengukur kerjanya.

Pengukuran kinerja menjadi penting karena setiap tujuan yang berbeda memerlukan ukuran kinerja yang berbeda. Kloot (1999) mengindikasikan bahwa ukuran kinerja dirancang untuk mengukur tingkat tujuan yang telah dicapai, kepuasan komunitas, kinerja pelayanan, dan untuk perbandingan antar instansi di Pemerintah Daerah.

Studi yang dilakukan oleh Faried (2016) peran sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan yang mendasar saat ini adalah bagaimana upaya untuk mendorong kinerja Sekretariat DPRD agar dapat melaksanakan tugasnya, mengingat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan dan menjadi mitra pemerintah daerah. Kedudukan DPRD dalam politik penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPRD tidak dapat lepas dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf yang membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD selama ini belum menunjukkan efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan, ini disebabkan kurangnya koordinasi dari pimpinan terhadap staff, kurangnya kerjasama yang baik antara anggota unit organisasi dan staf dalam organisasi, kurang lancarnya komunikasi antara pimpinan dan staf. Sekretaris selaku pemimpin anggota organisasi tidak lepas kaitannya dengan aktivitas-aktivitas para pegawai yang perlu diatur dan disusun sebaik-baiknya. Hal ini berkaitan dengan terdapatnya unit-unit organisasi maupun individu yang mempunyai fungsi yang berbeda dalam rangka penyelenggaraan organisasi secara keseluruhan. Terdapat bermacam-macam keterampilan dan pengetahuan pegawai, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya yang erat kaitannya terhadap keberhasilan organisasi. Selain itu ada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh semua individu maupun semua unit organisasi yang ada. Ada kesatu-paduan diantara seluruh kegiatan baik dilevel individu maupun pada unit organisasi. Ada keserasian karena kegiatan itu dilakukan menurut sistematisa, waktu pekerjaan dan menghindari kekosongan serta duplikasi kegiatan organisasi. Terdapat arah yang dari keseluruhan unit organisasi yang sama-sama bergerak pada sasaran atau tujuan yang sama. Apabila pimpinan di Sekretariat DPRD dapat melaksanakan koordinasi internal dengan baik maka efektivitas kerja pegawai akan tercapai. Lebih jelasnya pimpinan yang melakukan koordinasi dengan baik akan mempunyai pengaruh yang besar dalam peningkatan efektivitas kerja

pegawai sehingga akan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Melalui koordinasi, seluruh kegiatan organisasi Sekretariat DPRD dapat diatur, diselenggarakan dan dibina agar kegiatan tiap individu dalam struktur organisasi yang ada, baik pada jajaran sub bagian tercapai secara optimal berupa efektivitas kerja secara keseluruhan.

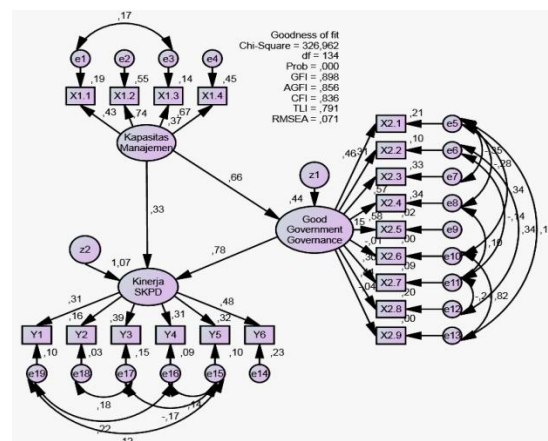
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara cross sectional yaitu suatu waktu tertentu dengan banyak sampel yang hanya dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan. Objek dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berjumlah 135 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 101 responden. Penentuan anggota sampel yang akan menjadi responden dilakukan dengan metode accidental sampling, yaitu penentuan sampel secara sengaja, yaitu peneliti sengaja mendatangi pegawai pada masing-masing bagian dan bertemu langsung dengan calon responden serta jika calon responden bersedia dijadikan sebagai sumber data, maka dimasukkan menjadi anggota sampel (Singarimbun dan efendi, 1995). Teknik analisis yang digunakan pada penelitian adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan program AMOS (Analysis Of Moment Structural) (Ferdinand, 2002).

HASIL PENELITIAN

Analisis Pengukuran Model Struktural

Setelah dilakukan analisis faktor konfirmatori selanjutnya dilakukan estimasi model struktural dengan metode *Maximum Likelihood* (ML). disajikan pada Gambar 1 dan *Nilai goodness of fit* dari hasil uji analisis faktor konfirmatori adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Kriteria Goodness Of-Fit Index Full Model Akhir

Goodness Of-Fit Index	Cut-Off Value	Hasil Analisis	Evaluasi Model
Chi-Square	Diharapkan Kecil	326,967	Fit
CMIN/DF	≤ 2,00	2,440	Marginal
GFI	≥ 0,90	0,898	Marginal
AGFI	≥ 0,90	0,856	Marginal
CFI	≥ 0,95	0,836	Marginal
TLI	≥ 0,95	0,791	Marginal
RMSEA	≤ 0,08	0,071	Fit

Tabel 2. Pengaruh Langsung

Jalur			Standardized Estimate	Critical Ratio	Probabilitas	Ket
H1 Kapasitas Manajemen	→	Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik	0,662	4,448	0,000	Sig
H2 Kapasitas Manajemen	→	Kinerja Sekretariat DPRD	0,333	1,687	0,092	TS
H3 Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik	→	Kinerja Sekretariat DPRD	0,783	2,192	0,028	Sig

Tabel 3. Koefisien Jalur (Standardized Regression) Pengaruh Antar Variabel

Variabel	Kapasitas Manajemen		Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik		Kinerja Sekretariat DPRD	
	L	TL	L	TL	L	TL
Tata Kelola Pemerintahan Yg Baik	0,662	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kinerja Sekretariat DPRD	0,333	0,518	0,783	0,000	0,000	0,000

PEMBAHASAN

Kapasitas Manajemen Berpengaruh Terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik: Hasil analisis uji hipotesis diketahui bahwa Kapasitas Manajemen berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan salah satu faktor yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang baik adalah peran penting dari kapasitas manajemen Sekretariat DPRD dalam mendukung pembangunan daerah dan juga membangun tata kelola Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kinerja organisasi sektor publik/ satuan kerja perangkat daerah (Sekretariat DPRD), kerangka struktural mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melembagakan aturan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik yang esensial yang harus diikuti oleh administrasi pemerintahan (Widodo, 2001).

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Kim (2008) dalam *government performance project* (GPP) dimana istilah “kapasitas manajemen” mengacu pada kemampuan intrinsik pemerintah dalam mengarahkan, mengembangkan, mengarahkan, dan mengontrol modal sumber daya manusia, fisik, dan informasi untuk mendukung pemberlakuan arah kebijakannya, Membangun kapasitas manajemen berarti mewujudkan visi keorganisasian atau mereformasi aturan dan struktur serta membangun kapasitas operasional untuk mencapai visi tersebut.

Kapasitas Manajemen Berpengaruh Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD: Rendahnya kompetensi dan pengetahuan SDM yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD juga berpengaruh terhadap dimensi-dimensi kinerja pegawai seperti pada kemampuan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan relaisasi anggaran, rendahnya produktivitas dan belum maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Belum maksimalnya Sekretariat DPRD dalam hal Tanggung jawab yang diberikan sesuai Tupoksi juga mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD yang dapat dilihat pada dimensi ukuran produktivitas, ukuran kualitas dan ukuran pelayanan. Untuk itu sangat diperlukan penilaian dari masyarakat terkait hal ini, apakah output berupa pelayanan masyarakat yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan perubahan kebijakan yang dapat ditempuh oleh para stakeholder untuk lebih serius dalam menangani hal ini, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara maksimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Yung, et al. (2011) yang menunjukkan bahwa dalam penilaian pengetahuan kapasitas manajemen, akuisisi dan diseminasi serta faktor komunikasi interaksi sosial positif terkait dengan kinerja organisasi. Selanjutnya, interaksi sosial memiliki pelengkap atau sinergis dengan efek interaksi dengan pengetahuan kapasitas manajemen pada kinerja organisasi. Mengingat kebutuhan untuk penggunaan kapasitas manajemen merupakan bagian untuk meningkatkan hasil organisasi, olehnya itu perlu menyadari bahwa dengan interaksi sosial akan memoderasi hubungan antara kapasitas manajemen dan kinerja organisasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kim (2008) dimana ia memahami bahwa

transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen yang penting dari kinerja sekretariat DPRD. Mengingat transparansi dan akuntabilitas merupakan alat yang penting, sebab tidak hanya memerangi korupsi, namun juga meningkatkan akuntabilitas serta kinerja yang lebih baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik Berpengaruh Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD:

Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan jika penerapan *good government governance* memegang peranan yang sangat penting bagi peningkatan kemampuan Kinerja sekretariat DPRD. Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik akan menuntut adanya pengembangan kinerja institusi baik pemerintah, bisnis dan masyarakat secara komprehensif pada semua tingkatan. Semua ini harus didukung dengan adanya sistem pelaporan akuntabilitas kepada publik yang merupakan prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang *good governance*. Sehingga secara konseptual, hubungan antara *good governance* dengan kinerja yang diwakili dengan terbentuknya visi dan misi yang hendak dicapai oleh institusi adalah mutualistik dan saling mendukung.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja sekretariat DPRD selain ditentukan oleh kapasitas manajemen, juga ditentukan oleh *good government governance* sebagai faktor pendukung dalam peningkatan kinerja sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Mahsun (2006) bahwa penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan pegawainya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi peningkatan atau kemajuan suatu organisasi dan termasuk di dalamnya adalah seluruh pegawainya untuk menghasilkan capaian yang lebih baik lagi.

Dalam manajemen modern, pengukuran terhadap fakta-fakta akan menghasilkan data, yang kemudian apabila data itu dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat, selanjutnya informasi itu akan berguna bagi peningkatan pengetahuan para manajer dalam pengambilan keputusan atau tindakan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik Berperan dalam Memediasi Pengaruh Kapasitas Manajemen Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara: Hasil uji analisis diketahui bahwa Tata kelola pemerintahan yang baik memediasi pengaruh kapasitas manajemen terhadap kinerja sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan

melihat nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung yang lebih besar daripada pengaruh langsung terhadap kinerja sekretariat DPRD. Hal ini membuktikan bahwa meskipun nilai-nilai kapasitas manajemen yang didukung oleh kerangka struktural, kerangka politik, kerangka SDM dan kerangka struktural yang sudah baik dalam meningkatkan *Good Government Governance*, tidak dapat meningkatkan kinerja sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara jika prinsip-prinsip yang terkandung Tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi masyarakat yang dapat diimplementasikan dimana semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka, adanya penegakan supremasi hukum dengan penerapan hukum yang harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia, adanya transparansi yang dibangun atas dasar informasi yang bebas, dimana seluruh pelaksanaan proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau, adanya kepedulian pada stakeholders dimana lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (Yann, *et al.* 2011).

Tersedianya orientasi pada konsensus membuat sekretariat DPRD mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, adanya kesetaraan sehingga semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka, adanya efektifitas dan efisiensi agar proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin, adanya penerapan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan, serta diperlukannya suatu visi strategis dan perspektif yang luas dan jauh kedepan dari para pemimpin dan masyarakat atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* di atas, maka diharapkan sekretariat

DPRD dapat mengimplementasikannya dengan baik sehingga para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kepuasannya. Selain itu, dengan pelaksanaan *good governance* yang baik akan dapat dapat membantu dalam memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akuntabilitas pemerintah, serta kinerja yang baik (Shalendra, 2007).

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang masih perlu dicermati dan dilakukan perbaikan oleh peneliti berikutnya. Keterbatasan yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada hanya pada Sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sekretariat DPRD Provinsi) sehingga implikasi hasil studi belum dapat digeneralisasi pada seluruh SKPD Se-provinsi.
2. Penelitian ini hanya meneliti variabel Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai variabel mediasi, namun masih ada variabel lain yang memungkinkan untuk dijadikan variabel mediasi yang lain seperti iklim organisasi dan Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD.

KESIMPULAN

1. Kapasitas Manajemen dengan indikator: kerangka struktural, kerangka politik, kerangka SDM dan kerangka simbolis berpengaruh positif signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik
2. Kapasitas Manajemen dengan indikator: kerangka struktural, kerangka politik, kerangka SDM dan kerangka simbolis berpengaruh positif tidak terhadap Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi.
4. Tata kelola pemerintahan yang baik berperan signifikan dalam memediasi pengaruh kapasitas manajemen terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

SARAN

Kapasitas Manajemen terkait kerangka struktural dan kerangka SDM masih perlu ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat meskipun sudah berada pada kategori baik.

1. Hendaknya secara periodik dan berkala dilakukan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan dari organisasi atau lembaga kepada pegawai sehingga pegawai merasa mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
2. Perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai secara periodik untuk memantau peningkatan atau penurunan kinerja pegawai, mengingat kinerja pegawai akan mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan.
3. Penelitian tentang Kapasitas Manajemen, Tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja Sekretariat DPRD yang akan datang, dapat melihat hubungan atau pengaruh timbal balik (sebab akibat) dari variabel-variabel yang ada. Selain itu dapat pula menambahkan variabel moderasi lain seperti iklim organisasi atau Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD.
4. Penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang agar lebih mempertimbangkan obyek penelitian untuk lebih meningkatkan kemampuan hasil penelitian dalam menggeneralisir suatu fenomena.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayodele A. A. 2011. *Corporate Governance Reforms in Nigeria: Challenges and Suggested Solutions*. Journal of Business Systems, Governance and Ethics. Volume 6, No 1.
- Behn, Robert D. 2003. *Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures*. Public Administration Review, Vol. 63 No.5 pp.586-606.
- Carlos. S. 2001. *Good governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality*. The Georgetown Public Policy Review Volume 7 Number 1 Fall 2001, pp.1-22.
- Dwiyanto. A., 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hal 1.
- Fariad, Syarif Muhammad. 2016. *Peran Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kinerja Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat*. JURMAFIS. Vo. 5. No.1.
- Ferdinand, Augusty. 2002. *Structural Equation Modeling dalam penelitian manajemen*. BP UNDIP. Semarang
- Joshua and Biekpe, Nicholas. 2007. *Corporate*

- governance, ownership structure and performance of SMEs in Ghana: implications for financing opportunities.* Corporate Governance, Vol. 7 Iss: 3, pp.288 – 300.
- Kloot. L., (1999). *Performance measurement and accountability in Victorian local government.* International Journal of Public Sector Management, Vol. 12 Iss: 7 pp. 565 - 584
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Morita, Sachiko and Zaelke. 2007. *Rule of Law, Good Governance, and Sustainable development.* University of California, Santa Barbara's Bren School of Environmental Science & Management, Dzaelke@inece.org
- Parker A., Serrano R. 2000. *Promoting Good Local Governance through Social Funds and Decentralization.* the United National Capital Development Fund, New York; and trust funds of the Government of Switzerland
- Permendagri No. 59 tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Propper,C. dan Wilson, D. 2003. *The Use and Usefulness of Performance Measures in The Public Sector.* Oxford Review of Economic Policy, Vol. 19 No. 2, pp.250-265.
- Seyoum B, Manyak T.G. 2009. *The impact of public and private sector transparency on foreign direct investment in developing countries.* international business, Vol. 5 Iss: 3 pp. 187 - 206
- Shalendra D. S. 2007. *Democracy, Good Governance, and Economic Development.* Taiwan Journal of Democracy, Volume 3, No.1: 29-62
- Singarimbun, M., Effendi,S. 1995. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kim, Soonhee. 2008. *A Management Capacity Framework for Local Governments to Strengthen Transparency in Local Governance in Asia.* United National Department of Economic and Social Affairs United Nations Project Office on Governance.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Widodo Joko . 2001. *Good Governance*, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.
- Yann Su. H, Fang S.C, Young C.S. 2011. *Relationship transparency for partnership enhancement: an intellectual capital perspective.* Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 26 Iss: 6 pp. 456 - 468
- Yung C.H, Chung J.C, Shao. C 2011. *Knowledge management capacity and organizational performance: the social interaction view.* International Journal of Manpower, Vol. 32 Iss: 5 pp. 645 - 660